

Peluang Kolaborasi Penta Helix bagi Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Lampung

Yuni Ratna Sari¹, Andri Marta², Indra Jaya Wiranata³, Dwi Wahyu Handayani³

¹Sosiologi Universitas Lampung, ²Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, ³Hubungan Internasional Universitas Lampung, ⁴Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung

Dikirimkan: 5 Juni 2022

Direvisi: 29 September 2022

Diterbitkan: 30 September 2022

INTISARI

Kolaborasi penta helix menjadi strategi bagi pengembangan desa wisata. Selama masa pandemi Covid-19 (C-19), kunjungan pariwisata mengalami penurunan dan pekerja wisata kehilangan pekerjaannya. Selain itu, desa wisata di Provinsi Lampung memiliki tantangan pada SDM pengelola wisata, sarana dan prasarana, daya tarik, transportasi, dan keterlibatan masyarakat. Maka dibutuhkan kepemimpinan pemerintah menginisiasi forum kolaborasi penta helix yang mengintegrasikan akademisi/perguruan tinggi, swasta, komunitas dan media, demi membangkitkan kembali sektor pariwisata pascapandemi C-19 dan menuntaskan tantangan pengembangan desa wisata. Penelitian bertujuan, pertama mengidentifikasi kepemimpinan pemerintah dan dukungan aktor non pemerintah secara kolektif, berorientasi konsensus, dan konsultatif. Kedua, mengidentifikasi peluang diterapkannya kolaborasi penta helix. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan data berasal dari berbagai lembaga terkait dan wawancara. Hasil penelitian bahwa kepemimpinan pemerintah dalam pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung pascapandemi C-19 baru menerapkan kolaborasi parsial dari model penta helix, dan belum optimal dalam menciptakan desain kebijakan yang memfasilitasi kolaborasi produktif dan berkelanjutan. Peluang pemerintah membentuk forum kolaborasi penta helix adalah masing-masing aktor pada aspek kolektif memiliki kapasitas dan keterbukaan untuk saling berkolaborasi. Aspek konsensus didasarkan atas motivasi bangkit dari pandemi C-19 dan menuntaskan tantangan pada sektor pariwisata. Aspek konsultatif, adanya keterbukaan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengembangan desa wisata.

KATA KUNCI

Pendekatan Penta Helix, *Collaborative Governance*, Desa Wisata, Pascapandemi Covid-19

Pendahuluan

Kajian pendekatan kolaborasi penta helix sebelumnya dilakukan secara deskriptif mengenai keefektifannya dalam mencapai tujuan kebijakan maupun program pembangunan. Kolaborasi penta helix digunakan untuk meningkatkan peran usia produktif pada pengembangan industri kreatif UKM (Wahyuningsih, 2021),

Korespondensi:

Sosiologi Universitas Lampung, Jl Prof Soemantri Brojonegoro No 1 Rajabasa Bandar Lampung 35145
Email: yuni.ratnasari@fisip.unila.ac.id

penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui sektor industri (Amrial, 2017), pengembangan pariwisata digital dan berkelanjutan (Suryandari, 2019). Pendekatan ini menjadi populer di masa Pandemi C-19 sebagai manajemen krisis, diantaranya dapat menyelamatkan pekerja pariwisata dari krisis ekonomi berkepanjangan akibat dampak pandemi C-19 (Herbasuki, 2021). Brasil tanpa tindakan kolaboratif maka muncul tindakan intensif di lingkungan pemerintahan, dengan efektivitas yang berbahaya dan efisiensi koordinasi yang kecil (Dallabrida et al., 2020). Pemerintah Ukraina, sektor swasta, organisasi nirlaba, dan warga negara menanggapi pandemi sejak dini, sehingga tanggapan bersama menghasilkan pengendalian awal penyebaran virus (Pysmenna, 2020). Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya kolaboratif komprehensif dari para aktor agar rantai virus C-19 terputus dan situasi membaik seperti semula (Megawati et al., 2020). Sinergi berbagai sektor publik maupun swasta sebagai pemerintahan kolaboratif, adalah faktor penting dalam pengendalian epidemi (Choi, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, telaah peluang kolaborasi penta helix pascapandemi pada sektor pariwisata sebagai kajian yang belum banyak dilakukan pada level pemerintah daerah. Peluang kolaborasi dilihat dari tiga hal. Pertama, aspek kepemimpinan pemerintah yang didukung SDM berkualitas (Nugraheni, 2018), menjaga dan melaksanakan visi (Megawati et al., 2020), pembentukan forum satuan tugas (Megawati et al., 2020), yang meluncurkan inisiatif memobilisasi publik, melibatkan sumber daya swasta untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan (Huang, 2020). Kedua, aspek kapasitas dukungan aktor adalah pada sisi pelaksanaan tugas oleh semua aktor yang dilakukan secara konsisten berdasarkan tupoksinya (Yuniningsih, 2019). Ketiga, sebagai manajemen krisis sektor wisata pascapandemi C-19 dengan karakter aman, menarik, layak secara ekonomi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan (Mao, 2020), medium interaksi level akar rumput guna mendorong perubahan (Dharma & Kasim, 2021), serta pelibatan partisipasi masyarakat, meningkatkan kearifan lokal, mandiri, berdaya, dan berkelanjutan (Sari et al., 2021).

Pendekatan kolaborasi sebagai strategi tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama, melibatkan aktor non pemerintah secara kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, dan mengelola program atau aset publik. Definisi ini menekankan kriteria penting: (1) forum diprakarsai lembaga publik, diorganisir secara formal dan bertemu secara kolektif, pesertanya termasuk aktor non-negara, (2) forum bertujuan mengambil keputusan melalui konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik), (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya "dikonsultasikan" oleh badan publik (Ansell & Gash, 2007).

Selanjutnya, kolaborasi penta helix merupakan kegiatan kolaboratif pemerintah dengan unsur akademisi, swasta, komunitas, dan media, yang memiliki peran dan tugas masing-masing, serta bekerja sinergis satu sama lain. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan tanggung jawab pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, alokasi anggaran, perizinan, program, kebijakan, pengembangan pengetahuan inovatif, dan dukungan untuk jaringan kemitraan publik-swasta. Akademisi sebagai konseptor sumber ilmu pengetahuan. Sektor swasta adalah entitas yang menjalankan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah, menghadirkan

infrastruktur teknologi dan modal melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan. Komunitas berperan sebagai perantara antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses. Media berperan dalam mendukung publikasi dan menjalankan fungsi sosialisasi kepada masyarakat (Wahyuningsih et al., 2021).

Prinsip-prinsip kolaborasi partisipatif adalah: keterlibatan warga, membangun kemitraan berkelanjutan, kapasitas kelembagaan, dan akuntabilitas (Sirianni, 2009). Pertama keterlibatan warga agar memproduksi barang publik bersama, memobilisasi aset sendiri, membagikan keahlian profesional yang memberdayakan untuk pemecahan masalah, memperkaya pengetahuan lokal, dan merefleksikan kepentingan diri sendiri dengan berbagai pemangku kepentingan. Kedua membangun kemitraan berkelanjutan, pada aspek ini pemerintah menjadi pemain strategis utama, karena memiliki mandat publik, sumber daya keuangan, dan posisi strategis pengembangan kapasitas sistem perencanaan lingkungan di seluruh jaringan nasional. Ketiga, kapasitas kelembagaan adalah transformasi budaya yang mendukung produksi bersama warga, keahlian bersama, dan praktik kolaboratif lainnya. Keempat, akuntabilitas di era kemitraan dan jaringan, desain kebijakan harus berusaha mengembangkan bentuk akuntabilitas kolaboratif yang demokratis.

Selanjutnya, konteks penelitian kolaborasi penta helix ini adalah pengembangan desa wisata pemerintah daerah di Provinsi Lampung pascapandemi C-19. Desa wisata sebagai kawasan pedesaan yang memiliki daya tarik berbasis kearifan lokal, keunikan dan keaslian seperti adat-istiadat, budaya, serta kekayaan alam, dan memiliki lebih dari satu daya tarik wisata, misalnya gabungan dari agrowisata, wisata budaya, dan *ecotourism* (Hermawan, 2016). Di Indonesia, desa wisata memiliki daya tarik tinggi sebagai tujuan perjalanan yaitu 36,42 persen pada tahun 2019 (BPS RI, 2020). Selain itu, pada Pedoman Desa Wisata (2021) pendekatan penta helix adalah sebagai upaya pengembangan desa wisata menuju kategori mandiri. Landasan hukum juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa pembangunan pariwisata tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah.

Pengembangan desa wisata sebagai kebangkitan sektor pariwisata pascapandemi C-19, karena berada di alam terbuka, memudahkan penerapan protokol kesehatan, menjadi tren perjalanan dengan tujuan meningkatkan wawasan dan pengalaman. Pemerintah Provinsi Lampung, juga turut merintis desa wisata. Sebaran penduduk Lampung melakukan kegiatan wisata kota dan pedesaan pada tahun 2019 mencapai 56,05 persen dari keseluruhan kategori wisata (BPS RI, 2020).

Sektor pariwisata secara keseluruhan, sejak masa pandemi tahun 2020 mengalami penurunan tingkat kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 117 ribu pada Februari 2021. Artinya mengalami penurunan 86,59%, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yaitu sebesar 872,8 ribu (Finance.detik.com., 2021). Sektor pariwisata rata-rata berkontribusi pada pemasukan devisa sebesar 15 miliar dollar AS satu tahun, pendapatannya turun 90 persen (Nasional.kompas.com., 2020). Imbas pandemi pada pariwisata di Lampung, diantaranya merujuk data jumlah tamu asing dan domestik yang menginap di hotel bintang dan non bintang/akomodasi lainnya tahun 2020 secara keseluruhan

tercatat sebanyak 691.764, menurun 292.916 (29,75 persen) dari jumlah tahun 2019 yaitu 984.680 (BPS Provinsi Lampung, 2021).

Tantangan pengembangan desa wisata adalah keterbatasan anggaran operasional dan pekerja pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pembatasan kegiatan pariwisata. “Selama pandemi aktifitas wisata mengalami penurunan, padahal destinasi wisata tetap membutuhkan pemeliharaan” (Ketua DPD AELI Lampung, wawancara 21 Agustus 2021, pukul 10.00 -11.45 WIB). “Selama masa pandemi, pariwisata di wilayah saya mati suri, minim pembiayaan operasional dan perawatan” (Ketua Forum Pokdarwis Lampung Timur, wawancara 21 Agustus 2021, pukul 10.00 -11.45 WIB). “Sebagian pekerja dirumahkan, dan melakukan inovasi dengan usaha lainnya demi bertahan hidup” (Ketua Umum DPD ASITA Provinsi Lampung, wawancara 26 Agustus 2021, pukul 15.30-17.00 WIB).

Oleh sebab itu, pada kebijakan pengembangan desa wisata dan tantangan pascapandemi dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata, maka sangat penting mengajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana peluang kolaborasi penta helix bagi pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung sebagai formula pemulihan dari Pandemi C-19?” Pada kerangka teori, peneliti menyandingkan pendekatan penta helix dan teori *collaborative governance*. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengambilan data primer dan sekunder, yaitu berasal dari berbagai lembaga terkait dan wawancara. Tahapan penelitian adalah pertama, mengidentifikasi kepemimpinan pemerintah di Provinsi Lampung dan dukungan aktor non pemerintah (akademisi/ perguruan tinggi, swasta, komunitas dan media yang memiliki peluang berperan pada upaya pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung) secara kolektif, berorientasi konsensus, dan konsultatif. Kedua, analisa peluang diterapkannya kolaborasi penta helix pada pengembangan desa wisata sebagai upaya bangkit pascapandemi C-19.

Pembahasan

Desa Wisata di Provinsi Lampung

Pengembangan desa wisata menjadi salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Program tersebut juga merujuk pada upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan-TPB (Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017). Program tersebut didukung dengan mekanisme anggaran dari pemerintah, misal pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa dana desa menjadi instrumen menciptakan usaha ekonomi, salah satunya pengembangan desa wisata. Prioritas pemulihan pariwisata pascapandemi C-19 mempunyai visi wisata berkualitas dan berkelanjutan. Konsep yang dibangun adalah ‘Bangga Berwisata di Indonesia’ dan tagar #DiIndonesiaAja, untuk mendukung narasi besar ‘*one village, one innovation*’ (Kemendesa. go.id., 2021 dalam Sari et.al., 2021).

Pariwisata berperan signifikan dalam perekonomian di Provinsi Lampung terumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung (2005-2025). Selanjutnya, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung 2011-2031 adalah mewujudkan Lampung sebagai daerah berbudaya, wisata

unggul dan berdaya saing. Selain adanya kebijakan yang mendukung, Lampung memiliki wilayah luas dan strategis, keindahan alam, kekayaan komoditi lokal, pertanian, ekonomi kreatif, budaya, serta ketersediaan infrastruktur.

Pada Pedoman Desa Wisata (2021) bahwa penetapan desa wisata dapat melalui tahapan pengusulan oleh kelompok masyarakat kepada pemerintah desa yang disetujui melalui musyawarah. Hasil musyawarah keputusan kepala desa disampaikan kepada pengembangan desa wisata, lanjut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat yang menangani urusan pariwisata. Selanjutnya, OPD melakukan verifikasi, uji kelayakan usulan desa wisata, yang memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pengelolaan desa wisata dapat dilakukan dengan 3 lembaga yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), koperasi desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM desa). Pendanaan desa wisata berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan dana desa yang berasal dari APBN. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang yang luas kepada desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Data desa wisata dapat dilihat pada website Jadesta.kemendparekraf.go.id., yang dikelola oleh Kemendparekraf sebagai wadah informasi, dan arah penyusunan rencana pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata dapat dijabarkan dalam 4 kategori, yaitu rintisan, berkembang, maju dan mandiri. Penentuan klasifikasi desa wisata dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun oleh perangkat desa yang membidangi pariwisata, dan OPD setempat yang membidangi pemberdayaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kategori desa wisata rintisan diupayakan beranjak ke kategori berkembang, maju, kemudian mandiri. Pada website tersebut, pengelola desa wisata di Lampung telah mengunggah sebanyak 98 profil desa wisata. Sebagian besar yaitu 65 % pada kategori rintisan, 26 % kategori berkembang, 9 % kategori maju, dan belum ada desa wisata yang mencapai kategori mandiri (lihat tabel 1).

Tabel 1. Daftar Desa Wisata di Provinsi Lampung

Kabupaten/ Kota	Kategori	Jumlah Desa Wisata	Nama Desa Wisata
Lampung Barat	Rintisan	10	Curup Way Segening, Temiangan Hill, Desa Danau Ranau, Sumber Jaya, Bukit Mabar, Puralaksana Cai Kahuripan, Dewi Riya, Sukajaya, Tambak Jaya, Sekincau.
	Berkembang	6	Pinus Ecopark, Bahway, Datar Petay Land, Trimulyo, Mabar Sukaraja, Rigis Jaya.
	Maju	1	Suka Marga
Tanggamus	Rintisan	3	Sailing, Putih Doh, Kampung Baru Waylalaan, Way Tebing
	Berkembang	1	Teluk Kilauan
Lampung Selatan	Rintisan	5	Way Tebing Cehala (WTC), Belerang Simpung Kecapi, Wana Wisata Simpung Helau, Desa Sri Katon, Desa Pangkul Sukaraja.
	Berkembang	1	Pematang Sunrise
	Maju	3	Kunjir, Way Kalam, Desa Wisata dan Konservasi Pantai Minang Rua.

Kabupaten/ Kota	Kategori	Jumlah Desa Wisata	Nama Desa Wisata
Lampung Timur	Rintisan	4	Beringin Indah, Braja Harjosari, Dewi Laras, Jejamo Waway.
	Berkembang	2	Bandar Negeri, Labuhan Ratu VII.
	Maju	1	Labuhan Ratu VI
Lampung Tengah	Rintisan	1	Embung Tanjung Anom
Lampung Utara	Rintisan	18	Air Terjun Goa Asri, Air Terjun Suka Datang, Curug Jono, Gunung Gijul, Curup Indra Djaya, Sindang Agung, Curup Kembar, Ratu Liu, Alam Rengas Indah, Bendungan Way Rarem, Curug Sukaemi, Wonomarto, Sribandung, Way Tebabeng, Wisata Kuliner Desa Kedaton, Embung Cinta Manis, Cempaka Raja Village (CRV), Gren Bell.
	Berkembang	6	Curup Bukit Reges, Pulau Setapak Indah, Kelawas Pekurun Barat, Bijai Raya Resort, Bening Indah dan Kolektif Park, Bendungan Tirtasinta Indah.
	Maju	1	Agrowisata Lembah Bambu Kuning
Way Kanan	Rintisan	6	Bonglay, Pokdarwis Kukuprafting, Bendungan Way Umpu, Kampung Wisata Gedung Batin, Juku Batu, Curup Jepun Negeri Baru.
	Berkembang	2	Air Terjun Putri Malu, Kampung Gunung Sari.
Tulangbawang	Rintisan	1	Kampung Aji Mesir Wisata Alam 21
Pesawaran	Rintisan	11	Mangrove Patenggoran, Kali Bronjong, Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada, Ketapang Bahari, Air Terjun Ciupang, Alam Bukit Lestari, Cukuh Cambai Resort, Kerbau Muara, Wisata Bahari Desa Durian, Taman Bukit Raya (Tabura), Tanjung Putus.
	Berkembang	3	Teluk Hantu dan Pulau Wayang Mini, Talang Mulya, Harapan Jaya.
	Maju	3	Arter Anglo, Purworejo, Pulau Pahawang.
Pesisir Barat	Rintisan	3	Taman Pemerihan, Pantain Pohon Cemara, Ulu Krui.
	Berkembang	2	Pantai Mandiri, Mandiri Sejati X Berdaya Krui.
Pringsewu	Berkembang	1	Taman Tirta Asri Sriwungu
Kota Bandar Lampung	Rintisan	2	Sentra Ikan Teri Pulau Pasaran, Sumberagung.
	Berkembang	1	Sumur Putri

Sumber: Diolah dari <https://jadesta.kememparekraf.go.id>, akses pada 30 Maret 2022 pukul 20.00.

Pada Pedoman Desa Wisata (2021) terdapat penjelasan mengenai klasifikasi desa wisata rintisan yang masih membutuhkan pengembangan dalam hal sarana prasarana, jumlah kunjungan wisatawan, kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata, pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta), pemanfaatan dana desa, dan pengelolaan bersifat lokal. Keterbatasan pada desa wisata rintisan tersebut membutuhkan upaya perbaikan melalui kolaboratif penta helix, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal, luar daerah bahkan mancanegara.

Motivasi untuk perbaikan kualitas layanan desa wisata, kemampuan berdaya saing, dan mampu bangkit pascapandemi, maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kememparekraf/Baparekraf) menggelar even Anugerah Desa Wisata (ADWI) sejak tahun 2021. Tujuh kategori penilaian ADWI

antara lain: penerapan CHSE (*cleanliness, health, safety, and environmental sustainability*), desa digital, souvenir (kuliner, fesyen, kriya), daya tarik wisata (alam, budaya, buatan), konten kreatif, homestay, dan toilet (Kememparekraf.go.id). Pada tahun 2021, Provinsi Lampung berhasil terpilih sebagai desa wisata terbaik ketiga kategori desa wisata rintisan yaitu Kampung Kopi Rigis Jaya Lampung Barat. Tahun berikutnya, terdapat 66 desa dari Provinsi Lampung masuk nominasi ADWI 2022 (Radarlampung.co.id., 2022).

Selanjutnya, pada tabel 2 adalah hasil kutipan wawancara dari informan non pemerintah mengenai persoalan pengembangan desa wisata, meliputi *attraction, amenities* (fasilitas) destinasi wisata, akomodasi, aksesibilitas, sumber daya manusia, dan keterlibatan masyarakat.

Tabel 2 Persoalan Pengembangan Desa Wisata

Kriteria Desa Wisata	Kelemahan
SDM unggul	“Sumber daya manusia pengelola wisata masih rendah” (Ketua Umum DPD ASITA Provinsi Lampung, wawancara 26 Agustus 2021 pukul 15.30-17.00)
	“Komunitas swasta di Lampung banyak tapi belum ada badan yang menaungi seperti di daerah lain yaitu gabungan industri pariwisata Indonesia” (Pendiri website Desa Wisata Lampung, wawancara 21 Agustus 2021 pukul 10.00 -11.45 WIB).
	“Penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata juga beragam untuk setiap wilayah. Beberapa destinasi pembinaan, belum tentu kadesnya mau memberi anggaran desa untuk maju di bidang pariwisata” (Ketua Forum Pokdarwis Lampung Timur, wawancara 21 Agustus 2021 pukul 10.00 -11.45 WIB).
Amenitas (sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas dan layanan wisatawan)	“Promosi masih sangat kurang, karena lemahnya sarana parasarana jaringan internet, misal Pesisir Barat, sehingga minim publikasi dokumentasi wisata” (Pendiri website Desa Wisata Lampung www.desawisatalampung.com , wawancara 21 Agustus 2021 pukul 10.00 - 11.45 WIB).
	“Segi infrastruktur yaitu jalan yang rusak, fasilitas umum belum memadai” (Ketua Umum DPD ASITA Provinsi Lampung, wawancara 26 Agustus 2021 pukul 15.30-17.00)
Atraksi/daya tarik (alam, budaya, kreatif/buatan)	“Ditetapkan desa wisata hanya karena mempunyai air terjun, dan tak ada aktifitas lain selain wisata alam” (Pendiri website Desa Wisata Lampung, wawancara 21 Agustus 2021 pukul 10.00 -11.45 WIB).
Aksesibilitas (transportasi yang memudahkan)	“Segi infrastruktur yaitu jalan yang rusak” (Ketua Umum DPD ASITA Provinsi Lampung, wawancara 26 Agustus 2021 pukul 15.30-17.00).
Keterlibatan masyarakat	“Sikap masyarakat di wilayah pariwisata masih rendah. Belum ada upaya pemerintah merangkul tokoh adat dalam perencanaan konsep wisata. sehingga dapat terlihat kekhasan Lampung lewat penataan dan wajah arsitektur wilayahnya” (Ketua Umum DPD ASITA Provinsi Lampung, wawancara 26 Agustus 2021 pukul 15.30-17.00).
	“Tantangan pengembangan desa wisata juga datang dari masyarakat, yaitu membutuhkan waktu khusus, membutuhkan dana, sumber daya manusia kurang, pesimis akan berhasil” (Sekretaris GenPI Lampung, wawancara 26 Agustus 2021 pukul 19.30 WIB).

Pada tabel 2 menunjukkan rincian persoalan pengembangan desa wisata meliputi aspek SDM yaitu kapasitas pengelolaan wisata dan tingkat komitmen aparatur pemerintah terhadap pengembangan desa wisata. Aspek amenities, terkait promosi yang belum memadai, jaringan internet lemah dan belum menjangkau desa wisata, pasokan listrik terbatas, dan fasilitas umum belum memadai. Aspek atraksi yaitu perintisan desa wisata hanya karena mempunyai daya tarik keindahan alam belum pada aktifitas lain berdasarkan budaya dan buatan (kreatifitas). Aspek aksesibilitas yaitu adanya jalan rusak. Aspek keterlibatan masyarakat, diantaranya sikap masyarakat yang pesimis terhadap pengembangan desa wisata, sikap penerimaan kehadiran wisatawan, serta tokoh masyarakat dan adat yang belum dilibatkan dalam program.

Peran Kolektif, Konsensus dan Konsultatif

Pada sub bahasan ini, peneliti menguraikan peluang kolaborasi penta helix pada peran kolektif, konsensus dan konsultatif. Peran kolektif adalah terbentuknya forum yang diprakarsai lembaga publik, diorganisir secara formal, bertemu secara kolektif, dan pesertanya termasuk aktor non-negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperlukan forum pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung baik pada level pemerintah provinsi hingga desa, yang melibatkan unsur akademisi/ perguruan tinggi, swasta, komunitas dan media. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung belum memiliki forum kolaborasi penta helix dalam upaya pengembangan desa wisata (Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, wawancara 3 September 2021, pukul 09.00-11.30 WIB).

Berdasarkan berita di berbagai media online (tabel 3), menunjukkan data menarik bahwa hampir semua pemerintah kota/kabupaten dan provinsi tetap menjalin kerjasama pengembangan desa wisata dengan berbagai pihak selama masa pandemi. Meskipun, belum ada kolaborasi yang mengintegrasikan secara formal elemen pemerintah, akademisi, komunitas, swasta dan media. Pola kerjasama telah ada, dalam bentuk pengembangan infrastruktur, sarana prasarana, dan pelatihan (Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dispar dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, wawancara 3 September 2021, pukul 09.00-11.30 WIB). Selain itu, promosi, sosialisasi dan juga memfasilitasi agar mendapatkan pendanaan pemerintah pusat, dan upaya diversifikasi produk wisata (Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata Pada Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, wawancara pada 3 September 2021, pukul 09.00-11.30 WIB).

Tabel 3. Jenis, Jaringan dan Program Kolaborasi Selama Masa Pandemi C-19

Jenis Kolaborasi	Jaringan Kolaborasi	Program
Pemerintah, BUMN	Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat (Berita.yahoo.com, 2021).
Pemerintah, BUMN	Pemkab Lampung Barat, Dinas Kepemudaan, Olahraga	Sosialisasi mengenai sistem Quick Response Indonesia Standard (QRIS), pelatihan usaha mikro, kecil, dan

Jenis Kolaborasi	Jaringan Kolaborasi	Program
	dan Pariwisata (Disporapar) Lampung Barat, Bank Indonesia	menengah (UMKM) dan program Sekolah Penggerak Pariwisata (Lampung.tribunnews.com, 2021).
Pemerintah, komunitas, swasta	Dinas Pariwisata, Budaya dan Olahraga (Disparbudpora) Tanggamus, pokdarwis, UMKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan dana hibah kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) kabupaten setempat; ▪ melibatkan pokdarwis sebagai tim relawan gugus tugas C-19; ▪ menukar tiket tanda masuk ke tempat wisata dengan jamu kesehatan yang diproduksi oleh UMKM lokal Tanggamus; ▪ sosialisasi protokol kesehatan dalam memutus mata rantai C-19, agar tempat wisata memenuhi ketentuan 3M (mencuci tangan pakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak), dan melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri di lokasi objek wisata, membuat banner kawasan wajib masker, menyediakan tempat cuci tangan dan pengukur suhu tubuh (Lampung.kejarfakta.co, 2020).
Pemerintah, komunitas	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan masyarakat	Membangun tempat wisata kuliner baru di Kampung Karang Endah, bernama Pasar Kuliner Karang Endah (Pakare) (Lampung. suara.com, 2021).
Pemerintah, komunitas	Pemerintah Kabupaten Mesuji dan masyarakat setempat	Pemkab Mesuji meresmikan destinasi wisata Wisata Asik Wiralaga (WAW) di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji (Mesujikab. go.id., 2021).
Pemerintah, komunitas	Indonesian Fighter Tourism Association (IFTA) dan Pemerintah Daerah Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksplorasi dengan memperkenalkan, uji trip, pendampingan dan promosi open trip. ▪ menggelar acara Famtrip ke Lampung Barat pada 13 Juni- 17 Juni 2021. IFTA pada kegiatan Famtrip ke Lampung Barat berhasil mendatangkan 40 perusahaan tour and travel dari delapan provinsi, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Bandar Lampung, Medan, Palembang, Kalimantan Tengah (Lampung. tribunnews.com., 2021).
Pemerintah, komunitas	Pemda Lampung Selatan dan IFTA	Berupaya melakukan penjajakan, pemetaan wilayah, problematika, dan mengukur program desa wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan (Suara.com., 2021).
Pemerintah, komunitas	Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Cyber Global Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program wirausaha mandiri dengan pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses dan pelayanan informasi serta membangun usaha mikro melalui usaha Warung Kopi Digital (Warkop Digital). ▪ Mendukung Program Desa Digital (Mediaindonesia.com., 2021).
Komunitas, masyarakat	Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Lampung dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menginisiasi pasar kreatif Payungi di Kelurahan Yosomulyo Kota Metro, yang berbasis desa wisata, ekonomi kreatif, dan jiwa enterpreneur warga.

Jenis Kolaborasi	Jaringan Kolaborasi	Program
	Yosomulyo, Kota Metro.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekolah Penggerak Wisata Kota Metro, sebagai wahana pendidikan, pendampingan untuk menggali potensi wisata, mengelola, dan mempromosikan (Payungi.org., 2021).
BUMN dan masyarakat	PT Telkom Wilayah Lampung dan masyarakat sadar wisata (Masata)	Aplikasi bagi calon wisatawan, mempermudah memilih tempat wisata, melakukan pembayaran tiket masuk, wahana, penginapan dan tempat makan (Lampung.antara news.com., 2020)

Selanjutnya, adanya dukungan dari unsur penta helix non pemerintah. Misalnya, komunitas relawan desa wisata Lampung memberi pelatihan-pelatihan yang melibatkan mahasiswa, yaitu membuat portal dengan biaya terjangkau bagi pengelola destinasi pada kategori wisata yang sedang merintis (Pendiri website Desa Wisata Lampung, wawancara 21 Agustus 2021, pukul 10.00 -11.45 WIB). Masyarakat Rigin Jaya bergotongroyong mempersiapkan rencana pengembangan desa wisata, dan aktif menyampaikan kebutuhan programnya kepada pemerintah (Pendamping pariwisata Desa Rigin Jaya Lampung Barat, wawancara 21 Agustus 2021, pukul 10.00-11.45 WIB). Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Lampung berkoordinasi dengan PHRI Pusat mendukung pelaksanaan vaksinasi untuk menekan kasus C-19, sehingga mengembalikan kepercayaan wisatawan pada sektor perhotelan dan restoran.

Kelompok akademik/ perguruan tinggi memiliki peran Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian, pengabdian, dan pengajaran yang bertindak sebagai konseptor pengembangan desa wisata, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Pada pengajaran, terdapat lembaga pendidikan dan mata kuliah berbasis pariwisata, seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Kampus KridaWisata setingkat Diploma 1, Jurusan Hubungan Internasional (HI) Universitas Lampung memiliki mata kuliah Pariwisata dalam HI, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung memiliki Prodi D3 Perjalanan Wisata. Pada pengabdian dan penelitian, berbagai PT telah mencantumkan pariwisata menjadi salah satu bidang kajian/kegiatan pada renstra penelitian/pengabdian.

Namun belum ada perguruan tinggi di Lampung yang memiliki pusat kajian pariwisata, seperti Pusat Studi Pariwisata UGM, Pusat Studi Pengembangan Pariwisata dan Budaya Universitas Muhammadiyah Gorontalo (PUSTUP PB-UMGo), Pusat Studi Kebudayaan dan Pariwisata Universitas Nusa Cendana Kupang (NTT), Tim Peneliti Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana (Bali), Center of Tourism and Creative Business (CoTRES) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Sektor swasta sebagai *enabler*, merupakan entitas yang menjalankan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan. Pada sektor pariwisata di Lampung telah komunitas bisnis yang terlibat, diantaranya perbankan, UMKM, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung, Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Lampung, Asosiasi Aplikasi Ojek Online Lampung, Indonesian Fighter Tourism Association (IFTA), Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung, PT Telkom Wilayah Lampung, Cyber Global Indonesia,

Asosiasi Experiential Learning Indonesia (AELI) Lampung, Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Provinsi Lampung.

Komunitas sebagai perantara antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses. Komunitas wisata di Lampung diantaranya Masyarakat sadar wisata (Masata), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis pada setiap desa), Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Lampung. Kelima, media bertindak dalam mendukung publikasi dan menjalankan fungsi sosialisasi kepada masyarakat. Lampung memiliki banyak media, media cetak yang terbit setiap hari (Lampung Post, Radar Lampung dan Tribun Lampung), media pemberitaan online yang update setiap hari, dan perkembangan penggunaan media sosial.

Aspek konsensus, menekankan bahwa forum penta helix bertujuan mengambil keputusan melalui konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik). Konsensus untuk mewujudkan forum penta helix, adalah tindakan bersama membangkitkan pariwisata pascapandemi. Pelayanan wisata pascapandemi merujuk kepada pencapaian kepemilikan sertifikat (kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan-CHSE), tetap melakukan promosi pariwisata, dan memastikan vaksinasi bagi pekerja pariwisata berjalan optimal. Pelaksanaan hal tersebut membutuhkan kolaborasi penta helix.

Terakhir, kegiatan konsultatif adalah peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Peluang pengembangan kolaborasi penta helix pada aspek konsultatif, terlihat dengan beberapa kemampuan konsultatif yang sudah ada. Pemerintah provinsi dan kota/kabupaten melalui dinas pariwisatanya selalu rutin mengadakan kunjungan ke desa-desa wisata.

“Kami datang langsung, *sharing*, dan memberi pendapat tapi bukan yang menggurui, karena terkadang mereka lebih paham tentang pengembangan desa wisatanya. Kami juga tahu bahwa pihak kabupaten juga melakukan hubungan yang intensif kepada pengelola desa wisata (Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata Pada Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, wawancara 3 September 2021 pukul 09.00-11.30 WIB).

Elemen konsultatif bukan saja dilakukan pemerintah dan pengelola desa wisata. Tapi juga pemerintah dan komunitas, seperti dilakukan Indonesian Fighter Tourism Association (IFTA) Lampung. Ketua Umum IFTA (wawancara 19 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB) menjelaskan IFTA turut mendukung dan mengikuti arah tujuan program pengembangan desa wisata. Namun dalam pelaksanaannya IFTA juga memberikan unsur inovasi dalam program tersebut, misalnya pada pengembangan desa wisata berbasis potensi kopi di Lampung Barat, IFTA berperan dalam eksplorasi pengembangan potensi yang diperlukan.

Penutup

Pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung pada pascapandemi C-19 menunjukkan progres yang signifikan, beberapa desa wisata rintisan telah beranjak pada kategori berkembang dan maju, serta pengelola desa wisata memiliki semangat

untuk berkompetisi pada ajang Anugerah Desa Wisata (ADWI). Hal ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi parsial dari model penta helix. Meskipun, pemerintah desa, kota/kabupaten, hingga provinsi belum optimal menciptakan forum penta helix yang mengintegrasikan pemerintah dengan akademisi/ perguruan tinggi, komunitas, swasta, dan media. Dengan demikian, belum optimal dalam peran kepemimpinan menciptakan desain kebijakan pengembangan desa wisata yang mengeksplorasi, memfasilitasi kolaborasi produktif dan berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan.

Peluang terbangunnya kolaborasi penta helix pada pengembangan desa wisata di Lampung adalah masing-masing aktor pada aspek kolektif memiliki kapasitas dan keterbukaan untuk saling berkolaborasi. Pada aspek konsensus memiliki keinginan besar pada pengembangan desa wisata di Lampung, didasarkan atas motivasi bangkit dari pandemi C-19 dan menuntaskan tantangan pada sektor pariwisata. Tantangan pengembangan desa wisata adalah SDM pengelola wisata, komitmen aparatur pemerintah, sarana prasarana dan fasilitas, daya tarik desa wisata masih sebatas potensi alam, infrastruktur menuju desa wisata, dan partisipasi masyarakat desa. Pada aspek konsultatif, adanya keterbukaan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengembangan desa wisata.

Berdasarkan simpulan tersebut, kami memberikan saran sebagai berikut: pertama, pemerintah daerah sebagai regulator dan bertanggung jawab pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, kontrol, pengelolaan anggaran, pengembangan dan pengetahuan, serta kebijakan inovatif membutuhkan perda desa wisata. Diantaranya menginisiasi forum pengembangan desa wisata, mengatur arah kewenangan pengelolaan desa wisata bagi pemerintah desa, kota/kabupaten hingga provinsi, dan menetapkan desa wisata yang menjadi prioritas kebijakan pengembangan wisata. Kedua, membutuhkan prioritas aksesibilitas yaitu pembangunan infrastruktur pariwisata. Ketiga, pengembangan desa wisata di Lampung membutuhkan terbentuknya pusat studi pariwisata oleh perguruan tinggi. Keempat, pemaksimalan peran swasta dalam penyediaan amenities, peran komunitas pada atraksi/daya tarik wisata dengan mengembangkan budaya setempat dan karya kreatifitas masyarakat setempat, serta peran media dalam promosi, pengembangan desa wisata yang akuntabilitas dan demokratis. Kelima, semua aktor menjalankan prinsip kolaborasi dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menjalankan pengembangan desa wisata melalui musrenbang. Dengan demikian, mendorong masyarakat mengoptimalkan sumber daya lokal dalam membangun kapasitas pengelolaan wisata.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penggalan data selama penelitian lapangan.

Pendanaan

Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari Dana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung, melalui Dana Hibah BLU Tahun 2021.

Daftar Pustaka

Jurnal

Amrial, Askar Muhammad, Emil Muhamad. (2017). Penta Helix Model: A Sustainable Development Solution Through The Industrial Sector. *Ilmu Sosial dan Manusia*, ISSN: 2597-8640, <https://www.researchgate.net/publication/321106743>.

Ansell, Chris. Alison Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory, and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory JPART*. Oxford University Press, doi:10.1093/jopart/mum032., 18, 543–571.

Choi, Yon Jung. (2020). The Power of Collaborative Governance: The Case of South Korea Responding to C-19 Pandemic. *World Medical & Health Policy*, 12:4, 430-442.

Dallabrida, Valdir Roque. Daniel Knebel Baggio, Alexandre Zatera & Princela Santana Da Cruz. (2020). Collaborative Governance and its Role in Fighting the Pandemic: From the Conception of What it is to the Verification of its Inexistence. *Global Journal of Human-Social Science: H Interdisciplinary*, Volume 20 Issue 5 Version 1.0., 16-22.

Dharma, Alexander Arie Sanata. Azhar Kasim. (2021). Infodemi C-19 dalam Perspektif *Open Government*: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1, DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10372, 105-125.

Herbasuki. (2021). Policy Interventions to Overcome the Impact of Covid19 on Employment in the Tourism Sector, *Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, Vol 6, Nomor 1 2021, 28-42.

Hermawan, Hary. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, vol. III, no. 2, <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>, 105-117.

Huang, Irving Yi-Feng Huang. (2020). Fighting C-19 through Government Initiatives and Collaborative Governance: The Taiwan Experience. *Public Administration Review*, The American Society for Public Administration. DOI: 10.1111/puar.13239. Vol. 80, Iss. 4, 665–670.

Mao, Yexin. (2020). Combating C-19 Through Collaborative Governance: Lessons From East Asia, *Chinese. Public Administration Review*, volume 11, issue 2, 132-141.

Megawati, Suci. Fitrotun Niswah, Trena Aktiva Oktariyanda. (2020). Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic C-19 in Surabaya City. *Advances in Social*

Science: Education and Humanities Research, Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020), volume 473.

Nugraheni, Jacika Pifi. Sudarmo, Rutiana Dwi Wahyunengseh. (2018). Can Collaborative Leadership Be A Soul For Development Of Sustainable Tourism?: Study In Karanganyar District. *2nd International Seminar Series On Regional Dynamic (ISSRD) 2018.*

Pysmenna, Olga. (2020). Collaborative Pandemic Response Governance in a Developing Country: Exploring Ukraine's C-19 Response System. *International Journal of Policy Studies, 11(2), 241-262.*

Sari, Yuni Ratna, Andri Marta, Indra Jaya Wiranata, Dwi Wahyu Handayani, Veronica Desiana. (2021). Penta Helix Collaboration on Village Tourism Development Program in Indonesia Post C-19 Pandemic. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021), Atlantis Press SARL, volume 628, 25-32.*

Sirianni, Carmen. (2009). *Investing in Democracy Engaging Citizens in Collaborative Governance.* Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

Suryandari, Nikmah. (2019). Digital Revolution and the Development of Tourism Business. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 423, 2nd International Media Conference 2019 (IMC 2019).*

Wahyuningsih, Endah. Novy Setia Yunas, Anang Rohmad Jatmiko. (2021). Strengthening Community in Increasing Village Potential Through Penta helix Collaboration. *International Journal Of Research In Business And Social Science, vol 10 no 1, 149-157.*

Yuniningsih, Tri. Titi Darmi, Susi Sulandari. (2019). Model *Penta Helix* Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *Journal of Public Sector Innovation, Vol. 3, No. 2, 84 – 93.*

Laporan

BPS RI. (2020). Sebaran Penduduk yang Melakukan Perjalanan Menurut Provinsi Asal dan Jenis Kegiatan Wisata yang Dilakukan, Statistik Wisatawan Nusantara 2019, 70.

BPS Provinsi Lampung. (2021). Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya Provinsi Lampung 2020, 13.

Media

Berita.yahoo.com. (2021). PLN Kembangkan 104 Desa Wisata Dukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Diakses pada 8 April 2022 pukul 09.56 WIB, dari <https://id.berita.yahoo.com/pln-kembangkan-104-desa-wisata-105004014.html>.

Finance.detik.com. (2021). Sudah Setahun Pandemi, Pariwisata RI Masih Babak Belur. Diakses pada 14 April 2022 pukul 06.57, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5516455/sudah-setahun-pandemi-pariwisata-ri-masih-babak-belur>.

Jadesta.kemendagri.go.id. Diakses pada 30 Maret 2022 pukul 20.00 WIB, dari <https://jadesta.kemendagri.go.id>.

Kemendesa.go.id. (2021). Kemendes Dukung Pembangunan Desa Wisata di Kawasan Super Prioritas. Diakses pada 2 Agustus 2021, dari <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3657/kemendes-dukung-pembangunan-desa-wisata-di-kawasan-super-prioritas>.

Kemendagri.go.id. Anugerah Desa Wisata Indonesia. Diakses pada 9 April 2022 pukul 13.52 WIB, dari <https://kemendagri.go.id/ragam-pariwisata/Anugerah-Desa-Wisata-Indonesia>.

Lampung.antarnews.com. (2020). Telkom dan Masata Jalin Kerja Sama Dukung Dunia Pariwisata. Dari <https://lampung.antarnews.com/berita/452669/telkom-dan-masata-jalin-kerja-sama-dukung-dunia-pariwisata>.

Lampung.tribunnews.com. (2021). 63 Peserta Ikuti Sosialisasi Sekolah Penggerak Pariwisata di Lampung Barat. Diakses pada 8 April 2022 pukul 09.28 WIB, dari <https://lampung.tribunnews.com/2021/06/29/63-peserta-ikuti-sosialisasi-sekolah-penggerak-pariwisata-di-lampung-barat>.

Lampung.kejarfakta.co. (2020). Ini Inovasi Disparbudpora Tanggamus Dimasa Pandemi C-19. Dari <https://lampung.kejarfakta.co/news/16151/ini-inovasi-disparbudpora-tanggamus-dimasa-pandemi-C-19>.

Lampung.suara.com. (2021). Lampung Tengah Miliki Wisata Kuliner Baru Bernama Pakare. Dari <https://lampung.suara.com/read/2021/03/14/150319/lampung-tengah-miliki-wisata-kuliner-baru-bernama-pakare>.

Lampung.tribunnews.com. (2021). Disporapar dan IFTA Kerja Sama Promosi Destinasi Wisata Lambar. Diakses pada 8 April 2022 pukul 14.32 WIB, dari <https://lampung.tribunnews.com/2021/06/22/disorapar-dan-ifta-kerja-sama-promosi-destinasi-wisata-lambar>.

Mediaindonesia.com. (2021). Warkop Digital Jadi Bagian Pengembangan Desa Wisata. Diakses pada 8 April 2022 pukul 14.36 WIB, <https://mediaindonesia.com/teknologi/385679/warkop-digital-jadi-bagian-pengembangan-desa-wisata>.

Mesujikab.go.id. (2021). Bupati Saply Resmikan Wisata Asyik Wiralaga. Diakses pada 8 April 2022 pukul 14.09 WIB, dari <https://mesujikab.go.id/2021/03/24/bupati-saply-resmikan-wisata-asyik-wiralaga/>.

Nasional.kompas.com. (2020). Pengusaha Pariwisata Bagikan Tips Bertahan di Masa Pandemi, Apa Saja?. Diakses pada 2 Agustus 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/15/18154711/pengusaha-pariwisata-bagikan-tips-bertahan-di-masa-pandemi-apa-saja>.

Payungi.org. (2021) GenPI Lampung dan Payungi Gelar Talkshow, Dihadiri Wabup dan Kadis. Dari <https://payungi.org/genpi-lampung-dan-payungi-gelar-talkshow-dihadiri-wabup-dan-kadis/>.

Radarlampung.co.id. (2022). 66 Desa Wisata di Lampung Masuk Nominasi ADWI 2022. Diakses pada 9 April 2022 pukul 11.37 WIB, dari <https://radarlampung.co.id/66-desa-wisata-di-lampung-masuk-nominasi-adwi-2022/>.

Suara.com. (2021). Tim IFTA Explorasi Amazing Lampung Selatan Disambut Hangat Kadis Pariwisata. Diakses pada 8 April 2022 pukul 14.31 WIB, dari <https://www.suara.com/partner/content/fajarsatu/2021/07/01/102223/tim-ifta-explorasi-amazing-lampung-selatan-disambut-hangat-kadis-pariwisata>.

Daftar Narasumber

Edarwan, Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 3 September 2021, pukul 09.00-11.30 WIB.

Erni Suud, Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dispar dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, wawancara 3 September 2021, pukul 09.00-11.30 WIB.

Indra Jamal Nur, Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata Pada Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 3 September 2021, pukul 09.00-11.30 WIB.

M. Syaifullah, Ketua DPD AELI Lampung, 21 Agustus 2021, pukul 10.00 -11.45 WIB.

Darmanto, Ketua Forum Pokdarwis Lampung Timur, 21 Agustus 2021, pukul 10.00 - 11.45 WIB

M. Rozikin, Pendamping pariwisata Desa Rigis Jaya Lampung Barat, 21 Agustus 2021, pukul 10.00-11.45 WIB.

Hendra Perdana, Ketua Umum IFTA Lampung, 19 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB.

Arizo Fhasha Wilian Abun, Ketua Umum DPD ASITA Provinsi Lampung, 26 Agustus 2021, pukul 15.30-17.00 WIB.

Indra Agus Budiman, Pendiri website Desa Wisata Lampung, 21 Agustus 2021, pukul 10.00 -11.45 WIB.

Mustika Edi Santosa, Sekretaris GenPI Lampung, 26 Agustus 2021 pukul 19.30 WIB.

Tentang Penulis

Yuni Ratna Sari adalah dosen program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung. Penulis memiliki area riset seputar tema studi pembangunan, serta ketahanan dan pemberdayaan masyarakat.

Andri Marta adalah dosen program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung. Penulis memiliki area riset seputar tema kebijakan publik dan pembangunan pariwisata.

Indra Jaya Wiranata adalah dosen program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung. Penulis memiliki area riset seputar tema keamanan lingkungan, paradiplomasi, dan pariwisata.

Dwi Wahyu Handayani adalah dosen program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung. Penulis memiliki area riset seputar tema politik gender, kajian migrasi dan tenaga kerja, politik lingkungan dan politik identitas.